PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah 1
1.3. Landasan Hukum 12
1.4. Maksud dan Tujuan 13
1.5. Sistematika Penulisan 14

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 15

2.1. Evaluasi Renja DLH Triwulan II 2022 dan Capaian Renstra DLH 15
2.2. DATA CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRI WULAN II 16
2.3. Prestasi Urusan Lingkungan Hidup 24
2.4. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH 39
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 39

BAB III TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG 40

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 40
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 41

BAB IV PENUTUP 62

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pelaksanaan tugas fungsi dimaksud pada tahun 2021 mengacu pada rencana strategis (Renstra) DLH 2019-2024, dengan mempertimbangkan rancangan perubahan rencana strategis DLH 2019-2024.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka perlu adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang kemudian menjadi bahan utama masukan dan pertimbangan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD Kabupaten Magelang, serta pagu indikatif dan perkiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah yang baru. Bahwa dengan telah dilaksanakan analisa terhadap pelaksanaan perubahan renja DLH oleh Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, perlu diadakan perubahan renja DLH. Kondisi terkini dengan adanya pandemi Covid 19, perlu dipertimbangkan adanya refocusing anggaran daerah untuk penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi.

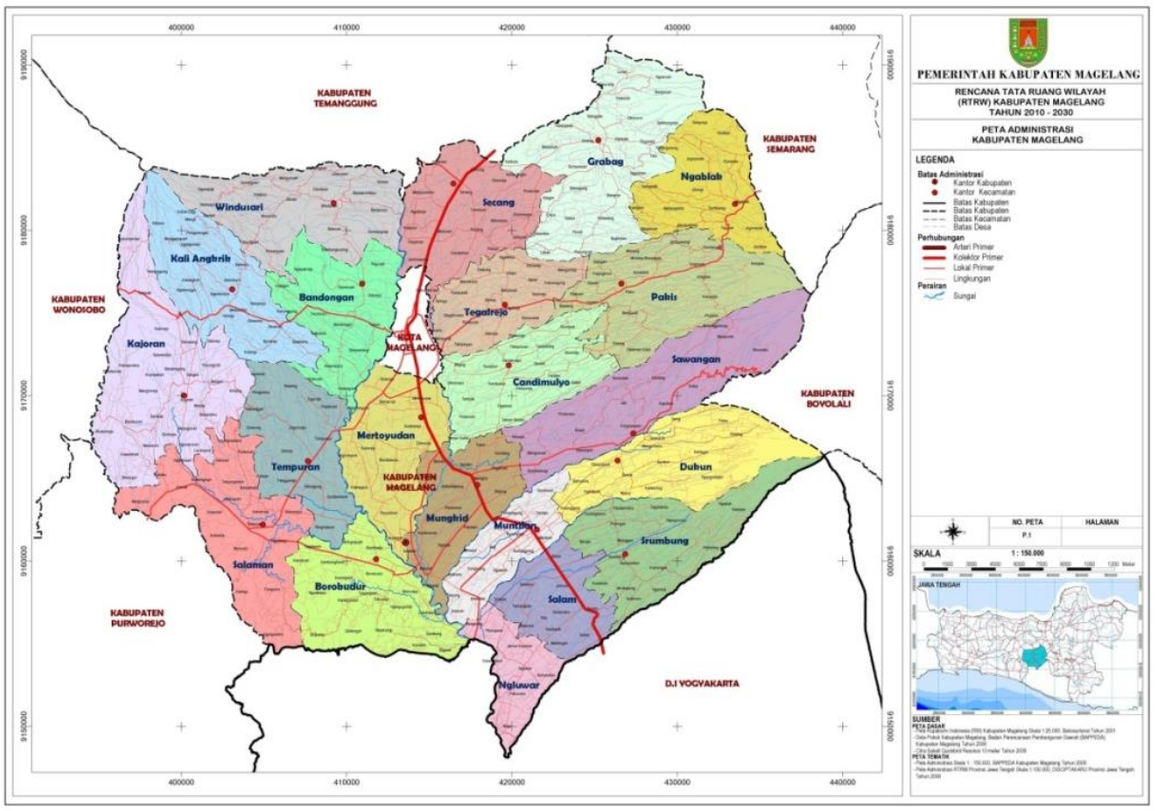
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 8 September 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021, perlu dibuat juga Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah DLH tahun 2021.

1.2. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

1.2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi

Kabupaten Magelang dengan ibukota di Kota Mungkid, termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah menurut BPS seluas 108.573 hektar atau sekitar 3,34 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pemetaan yang digunakan dalam penyusunan revisi RTRW Kabupaten Magelang, luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih adalah 113.034,84 hektar. Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak pada posisi antara $110^{0}01'$ 51" – $110^{0}26'58$" Bujur Timur dan $7^{0}19'13$" – $7^{0}42'16$" Lintang Selatan, dengan batas-batas Kabupaten Magelang sebagai berikut.

Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
Bagian tengah : Kota Magelang



Sumber: RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Magelang

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisinya, yaitu diantara dua kota besar, Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu, letak strategis Kabupaten Magelang juga dapat dilihat dari posisinya yang berada di antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi, yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo, sehingga memudahkan aksesibilitas, mendorong perkembangan ekonomi dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Magelang.

Berikut tabel mengenai luas masing-masing kecamatan, jumlah desa, dan kelurahan serta jarak kecamatan ke ibukota kabupaten di Kabupaten Magelang.

Tabel 1.1
Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan, serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	Salaman	20	-	68,87	6,34	15
2	Borobudur	20	-	54,55	5,02	4

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)	Persentase (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
3	Ngluwar	8	-	22,44	2,07	22
4	Salam	12	-	31,63	2,91	19
5	Srumbung	17	-	53,18	4,90	19
6	Dukun	15	-	53,40	4,92	21
7	Muntilan	13	1	28,61	2,64	17
8	Mungkid	14	2	37,40	3,44	7
9	Sawangan	15	-	72,37	6,67	15
10	Candimulyo	19	-	46,95	4,32	17
11	Mertoyudan	12	1	45,35	4,18	6
12	Tempuran	15	-	49,04	4,52	8
13	Kajoran	29	-	83,41	7,68	31
14	Kaliangkrik	20	-	57,34	5,28	34
15	Bandongan	14	-	45,79	4,22	20
16	Windusari	20	-	61,65	5,68	25
17	Secang	19	1	47,34	4,36	22
18	Tegalrejo	21	-	35,89	3,31	22
19	Pakis	20	-	69,56	6,41	29
20	Grabag	28	-	77,16	7,11	33
21	Ngablak	16	-	43,80	4,03	37
	Jumlah	367	5	1.085,73		

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2018

1.2.2 Topografi

Wilayah Kabupaten Magelang secara topografis sangat beragam dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Daerah yang bertopografi datar seluas 8.599 ha, bergelombang seluas 44.784 ha, topografi curam seluas 41.037 ha, dan sangat curam seluas 14.155 ha. Ketinggian wilayah antara 153-3.065 meter di atas permukaan laut. Ketinggian rata-rata 360 meter di atas permukaan laut. Kelerengan lahan dapat dilihat pada tabel berikut.

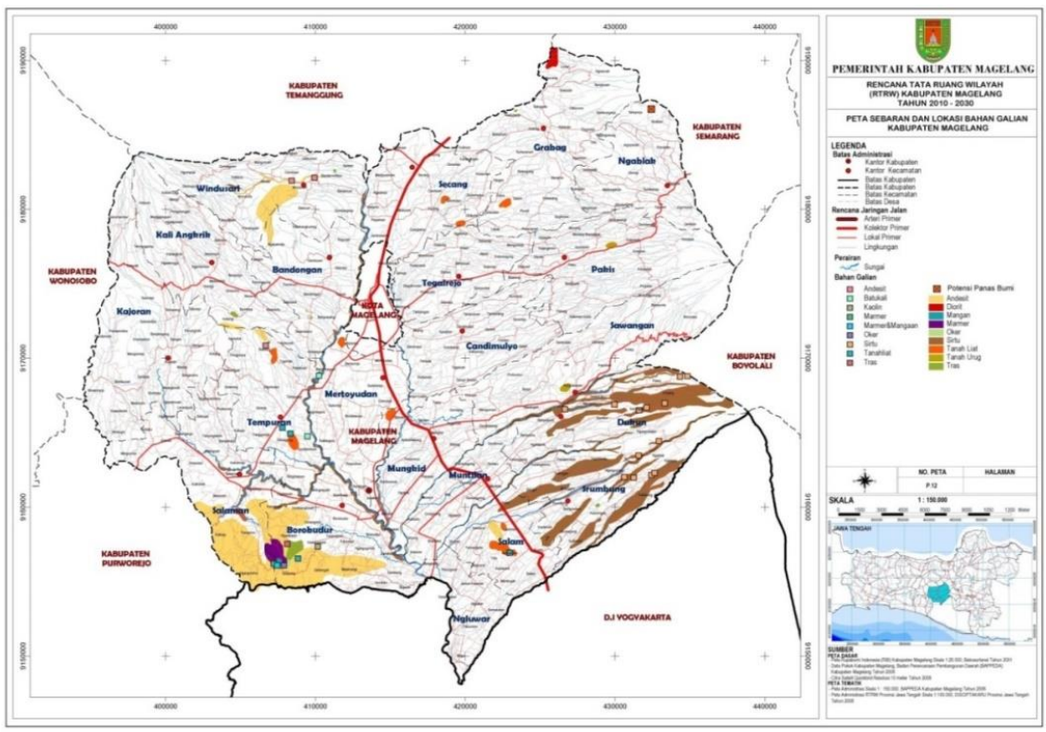
Tabel 1.2
Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang

No.	Kemiringan	Klasifikasi	Wilayah
1	0 - 2%	Datar	Kecamatan Mertoyudan, Secang, Windusari, Sawangan, dan Salaman (± 1,5% dari luas wilayah)
2	2 – 15%	Bergelombang sampai berombak	Sebagian besar kecamatan (17 kecamatan) atau 55% dari seluruh wilayah
3	15 – 40%	Bergelombang sampai berbukit	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Srumbung, sebagian Ngablak, Pakis, Sawangan, dan sedikit di Kecamatan Dukun (meliputi 25,5% dari seluruh wilayah)
4.	> 40%	Berbukit sampai bergunung gunung	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Srumbung, Ngablak, Pakis, Sawangan, dan Dukun (18% dari luas wilayah)

Sumber: RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

1.2.3 Geologi

Kabupaten Magelang di bagian barat daya (Kecamatan Salaman dan Borobudur bagian selatan) tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa lapili, aglomerat, dan lava andesit yang merupakan bagian dari formasi andesit tua. Batuan dari gunung berapi yang ada di sekeliling wilayah ini merupakan unsur batuan yang membentuk Dataran Magelang berupa tanah endapan alluvial yang subur. Sementara itu, Kabupaten Magelang bagian tengah merupakan tanah endapan/alluvial yang merupakan lapukan dari batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis.



Sumber: RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Gambar 1.2

Peta Sebaran Bahan Tambang di Kabupaten Magelang

Secara fisik, Kabupaten Magelang yang berbentuk cekungan (basin) dan dikelilingi oleh Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Telomoyo dan Pegunungan Menoreh memberikan manfaat positif bagi Kabupaten Magelang, seperti berlimpahnya bahan galian tambang golongan B dan C. Bahan tambang galian B dan C tersebut banyak tersebar di seluruh Kabupaten Magelang. Jenis bahan tambang yang jumlahnya relatif banyak adalah pasir batu dan marmer.

1.2.4 Hidrologi

Kabupaten Magelang memiliki curah hujan tinggi dan sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, rumah tangga, dan industri serta kebutuhan lainnya. Wilayah Kabupaten Magelang terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan Bogowonto. DAS Progo bagian hulu terdapat sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Progo. DAS Progo ini meliputi wilayah di Kecamatan

Windusari, Secang, Bandongan, Mertoyudan, Tempuran, Borobudur, Mungkid, Tegalrejo, Muntilan, Salam, Ngluwar, Grabag, Sawangan, Dukun, dan Srumbung. Sedangkan DAS Bogowonto berada di sebagian kecil wilayah Kecamatan Salaman dan Kajoran.

a. Air permukaan yaitu air yang mengalir di sungai-sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil. Sungai besar yang ada di Kabupaten Magelang adalah Sungai Progo.
b. Air tanah, di Kabupaten Magelang air tanah berdasarkan hidrologi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) mandala air tanah, yaitu:
    1) Mandala air tanah gunung api strato, air tanah jenis ini terletak di antara puncak sampai lereng Gunung Api Merbabu, Merapi, dan Sumbing.
    2) Mandala air tanah antar pegunungan, air tanah jenis ini berada di antara Gunung Api Merbabu, Merapi, dan Sumbing yang terletak di ketinggian berkisar antara 300-500 m di atas permukaan laut. Air tanah di daerah ini tersedia cukup banyak dengan produktivitas aquifer yang tinggi dan muka air tanah ini cukup dangkal (<10 m) dan debit sumur mencapai 4 liter/detik.

Posisi Kabupaten Magelang yang terletak di hulu DAS Progo dan dikelilingi oleh 3 (tiga) gunung api yang menyebabkan Kabupaten Magelang kaya akan mata air. Berdasarkan Penyusunan Profiling Mata Air tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa terdapat 223 sumber mata air, yang mana 55 mata air merupakan sumber mata air baru yang berhasil diidentifikasi. Berdasarkan pengukuran dilakukan antara bulan Mei sampai dengan Agustus 2018, dari 223 mata air, terdapat 13 mata air diidentifikasi mati dan 5 mata air tidak ada limpasan, sehingga mata air yang memiliki debit sebanyak 205 mata air dengan total debit dari hasil perhitungan sebesar 8.173,28 liter/detik. Debit tersebut jika dikonversi dalam setahun, maka memiliki potensi air mencapai 257.752.602 m^3/tahun.

Selain itu, ketiga gunung api yang ada di Kabupaten Magelang dengan kondisi fisiknya yang spesifik merupakan *recharge area* bagi DAS Kabupaten Magelang. Mata air yang bermunculan di kaki Gunung Merapi, Merbabu, dan Sumbing tersebut merupakan *discharge area*. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa *recharge area* dan *discharge area* di Kabupaten Magelang berada dalam satu wilayah administrasi. Hal tersebut akan mempermudah pengelolaan lingkungan utamanya dalam pengelolaan sumber daya air, sehingga akan terwujud tata kelola lingkungan yang lebih baik.

1.2.5 Klimatologi

Suhu rata-rata di Kabupaten Magelang adalah 25,62^{0}C dengan kelembaban udara 82%. Curah hujan rata-rata 3.922 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 189 hari dan kecepatan angin 1,8 knot.

Curah hujan merupakan salah satu sumber daya air yang mempengaruhi besaran debit mata air. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang Tahun 2018,

curah hujan pada tahun 2017 berkisar antara 0 - 506 mm/bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan yang tinggi.

Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt Ferguson, Mohr maupun Oldeman, Kabupaten Magelang sebagian besar bertipe iklim basah. Suatu bulan disebut bulan kering, jika dalam satu bulan terjadi curah hujan kurang dari 60 mm. Disebut bulan basah, jika dalam satu bulan curah hujannya lebih dari 100 mm.

Bulan basah dan bulan kering dikaitkan dengan kegiatan pertanian di daerah tertentu, sehingga penggolongan iklimnya disebut juga zona agroklimat. Dengan jumlah curah hujan sebesar 200 mm tiap bulan dipandang cukup untuk membudidayakan padi sawah. Dan untuk budi daya palawija, jumlah curah hujan minimal yang diperlukan adalah 100 mm tiap bulan.

1.2.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Magelang terdiri atas lahan sawah, lahan kering dan lahan bukan pertanian. Pada tahun 2019 terdapat pengurangan luasan lahan sawah dari 36.681 hektar pada tahun 2018 menjadi 27.899 hektar, untuk lahan bukan pertanian terjadi penambahan luasan dari 22.398 hektar pada tahun 2018 menjadi 25.302 hektar pada tahun 2019.

Perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Magelang tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.3

Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019 (Ha)

No.	Penggunaan Lahan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Lahan sawah					
1	Irigasi	27.898	27.653	27.732	27.732	22.911
2	Tadah hujan	8.964	9.202	8.949	8.949	4.988
	Jumlah	36.862	36.855	36.681	36.681	27.899
B	Lahan kering					
1	Tegal kebun	32.100	31.904	31.813	31.813	37.462
2	Perkebunan	399	2.219	2.317	2.317	2.725
3	Hutan rakyat	6.919	5.611	5.609	5.609	5.467
4	Padang rumput	2	2	2	2	2
5	Sementara tidak ditanami	107	7	7	7	9
6	Lainnya (kolam/empang/hutan negara)	10.016	9.807	9.746	9.746	3.207
7	Hutan Negara	-	-	-	-	6.500
	Jumlah	49.543	49.550	49.494	49.494	55.372
	Total lahan pertanian (A+B)	86.405	86.405	86.175	86.175	83.271
C	Lahan bukan pertanian					
1	(Jalan, permukiman, perkantorang, sungai, dll)	22.168	22.168	22.398	22.398	25.302
	TOTAL (A+B+C)	108.573	108.573	108.573	108.573	108.573

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2016 – 2020

Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Data menunjukkan bahwa penggunaan lahan terluas

adalah lahan pertanian. Oleh karena itu, sektor pertanian dijadikan unggulan karena adanya daya dukung potensi/ketersediaan lahan.

Berdasarkan hasil penghitungan KLHS RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024, daya dukung lahan terbangun di Kabupaten Magelang masuk dalam kategori daya dukung lahan bersyarat atau sedang dengan nilai 2,96. Dengan demikian, Kabupaten Magelang masih memiliki daya tampung bangunan yang relatif baik untuk pengembangan, namun ke depannya harus tetap memperhatikan karakteristik Kabupaten Magelang. Jika dilihat pada setiap kecamatan di Kabupaten Magelang, tidak ada kecamatan yang berada pada kategori terlampaui atau buruk. Kategori bersyarat/sedang terdapat di 12 kecamatan, yaitu di Kecamatan Borobudur, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Salam, Kecamatan Salaman, Kecamatan Secang, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Tegalrejo, dan Kecamatan Tempuran. Sedangkan dan kategori baik terdapat di 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Bandongan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Grabag, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Pakis, Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Windusari.

Untuk mengetahui sejauh mana fungsi lindung di Kabupaten Magelang, maka perlu dilihat daya dukung fungsi lindung.

Tabel 1.4
Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kabupaten Magelang 2017

Penggunaan Lahan	**Luas (Ha)**	**Luas (%)**	**Ci**	**∑ (ci x Ai)**
Cagar Budaya	102,24	0,09%	0,18	18,40
Danau	1,56	0,00%	0,98	1,53
Hutan Lindung	1.363,57	1,21%	1	1.363,57
Hutan Produksi Terbatas	1.792,44	1,59%	0,68	1.218,86
Hutan Produksi Tetap	2.049,51	1,81%	0,68	1.393,67
Industri	152,52	0,13%	0,18	27,45
Kebun Campur	43.060,87	38,10%	0,54	23.252,87
Kolam	16,60	0,01%	0,98	16,27
Lahan Terbuka	221,57	0,20%	0,21	46,53
Permukiman	18.912,56	16,73%	0,18	3.404,26
Rumput	0,22	0,00%	0,28	0,06
Sawah	28.688,43	25,38%	0,46	13.196,68
Taman Nasional	4.406,78	3,90%	1	4.406,78
Tegalan	11.310,22	10,01%	0,21	2.375,15
Tubuh Air	955,75	0,85%	0,98	936,64
Total	113.034,84	100%	0,46	51.658,71

Sumber: KLHS RPJMD 2019-2024

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, maka daya dukung fungsi lindung Kabupaten Magelang memiliki koefisien 0,46 berada dalam kategori sedang. Luas

lahan kebun memberikan kontribusi besar dalam daya dukung lindung yang tinggi, sementara permukiman dan lahan terbangun lainnya menyebabkan daya dukung lindung menjadi kecil.

Untuk hutan rakyat, luasannya selalu mengalami perubahan setiap tahunnya selama tahun 2014-2017. Secara implisit, pertambahan luas hutan rakyat di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa sumber daya hutan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi ekonomi dan juga mengurangi dampak bahaya bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Magelang seperti bencana gerakan tanah.

1.2.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi potensi pengembangan wilayah Kabupaten Magelang untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya sesuai dengan RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030.

Tabel 1.5
Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang
Berdasarkan RTRW Kabupaten Magelang

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	Kawasan peruntukan hutan produksi	
1.a.	Hutan produksi terbatas	Kecamatan Bandongan, Grabag, Kaliangkrik, Kajoran, Ngablak, dan Windusari
1.b.	Hutan produksi tetap	Kecamatan Bandongan, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Salaman, Tempuran, dan Windusari
2	Kawasan hutan rakyat	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Salam, Sawangan, Secang, Tempuran, dan Windusari
3	Kawasan peruntukan pertanian	
3.a.	Kawasan pertanian lahan basah	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Candimulyo, Dukun, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Mertoyudan, Mungkid, Muntilan, Ngablak, Ngluwar, Pakis, Salam, Salaman, Sawangan, Secang, Srumbung, Tegalrejo, Tempuran, dan Windusari
3.b.	Kawasan pertanian lahan kering	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Candimulyo, Dukun, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Mertoyudan, Mungkid, Muntilan, Ngablak, Ngluwar, Pakis, Salam, Salaman, Sawangan, Secang, Srumbung, Tegalrejo, Tempuran, dan Windusari
4	Kawasan peruntukan perkebunan	Kecamatan Grabag, Kajoran, Dukun, Borobudur, dan Salaman
5	Kawasan peruntukan perikanan	
5.a.	Daerah pembenihan	Kecamatan Muntilan, Sawangan, Dukun, Grabag, dan Mungkid
5.b.	Daerah pembesaran perikanan	Kecamatan Salam, Ngluwar, Mertoyudan, Kajoran, Bandongan, Secang, Srumbung, Candimulyo, dan Tegalrejo

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
6	Kawasan peruntukan peternakan	
6.a.	Kawasan peternakan besar	Kecamatan Sawangan, Candimulyo, Dukun, Kajoran, Windusari, Pakis, Ngablak, Grabag, Tegalrejo, dan Kaliangkrik, Bandongan, Secang, Srumbung, dan Salam
6.b.	Kawasan peternakan sedang	Semua kecamatan
6.c.	Kawasan peternakan unggas	Kecamatan Srumbung, Dukun, Salam, Secang, Salaman, Tempuran, Bandongan, Candimulyo, Grabag, Mertoyudan, dan Ngluwar
7	Kawasan peruntukan pertambangan	
7.a.	Kawasan peruntukan pertambangan batuan pasir batu	Kecamatan Windusari, Bandongan, Borobudur, Srumbung, Dukun, Pakis, Salam, Candimulyo, Muntilan, Ngluwar, Tempuran, Salam, Secang, Grabag, dan Salaman.
7.b.	Kawasan peruntukan pertambangan batuan marmer	Kecamatan Borobudur, Salaman, Tempuran, Bandongan, dan Windusari.
7.c.	Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam	Kecamatan Borobudur dan Salaman
8	Kawasan peruntukan pariwisata	
8.a.	Kawasan peruntukan pariwisata budaya	Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Ngawen, Candi Gunung Wukir/Canggal, Candi Asu, Candi Pendem, Candi Lumbung, Candi Selogriyo, Makam Gunung Pring, Makam Kyai Raden Santri dan Mbah Jogoreso, Makam Pasteur Van Lith, Makam Kyai Condrobumi, Makam Sunan Geseng, Langgar Agung Pangeran Diponegoro, Pasarean Pangeran Singosari, Makam Kyai Mijil, Makam Kyai Raden Syahid, dan Candi Umbul
8.b.	Kawasan peruntukan pariwisata alam	Air Terjun Sekarlangit, Air Terjun Seloprojo, Ketep Pass, Air Terjun Kedungkayang, Agro Wanawisata Sambak, Agro Wisata Salak Lumut, Pendakian Gunung Merapi, Pendakian Gunung Merbabu, Curug Silawe, dan Telaga Bleder
8.c.	Kawasan peruntukan pariwisata buatan	Taman Rekreasi Mendut, Ketep Pass, Induk Selokan Mataram (Wisata Bendungan Ancol), Taman Rekreasi Kalibening, dan Deyangan
9	Kawasan peruntukan industri	
9.a.	kawasan peruntukan industri mikro, kecil, menengah	tersebar di masing-masing kecamatan
9.b.	Kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus	tersebar di masing-masing kecamatan

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
9.c.	Kawasan peruntukan industri besar	Kecamatan Tempuran dan Salaman
10	Kawasan peruntukan permukiman	
10.a.	Kawasan peruntukan permukiman perkotaan	1. Perkotaan-perkotaan yang masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 2. Perkotaan Borobudur di Kecamatan Borobudur yang kaidah pengaturannya mengikuti Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) 3. Ibukota-ibukota kecamatan yang meliputi ibukota kecamatan di Kecamatan Windusari, Bandongan, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Salaman, Srumbung, Dukun, Sawangan, dan Candimulyo
10.b.	Kawasan peruntukan permukiman perdesaan	tersebar di luar ibukota kecamatan
11	Kawasan peruntukan lainnya	
11.a.	Kawasan pertahanan dan keamanan	Kecamatan Bandongan, Windusari, Borobudur, Salaman, Candimulyo, dan Tempuran
11.b.	Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan	tersebar di masing-masing kecamatan

Sumber: RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Dalam rangka membentuk dan memperkuat pola keterkaitan antar kegiatan dan pusat pelayanan serta mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, maka pengembangan wilayah di Kabupaten Magelang dilakukan dengan cara mendorong pertumbuhan peranan sektor pertanian, pariwisata, dan industri. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di wilayah Kabupaten Magelang yang menjadi pendorong pertumbuhan utama (main-prime-mover), yaitu sebagai berikut.

a. Kawasan strategis cepat tumbuh meliputi perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya, Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Perkotaan Muntilan dan sekitarnya, serta Perkotaan Salam dan sekitarnya.
b. Kawasan pertanian berbasis potensi lokal dengan konsep pengembangan agropolitan dan minapolitan, meliputi Kawasan Agropolitan Sumbing, Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu, Kawasan Agropolitan Borobudur, dan Kawasan Minapolitan.
c. Kawasan strategis pariwisata dengan konsep menumbuh-kembangkan potensi-potensi wisata daerah dalam rangka menciptakan beragam alternatif daya tarik wisata disamping Candi Borobudur, meliputi Kawasan Strategis Pariwisata A di Wilayah Sumbing dan sekitarnya, Kawasan Strategis B di Wilayah Merapi-Merbabu dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata C di Wilayah Merapi dan sekitarnya, dan Kawasan Strategis Pariwisata D di Wilayah Borobudur dan sekitarnya.
d. Kawasan peruntukan industri yang berbasis pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal.

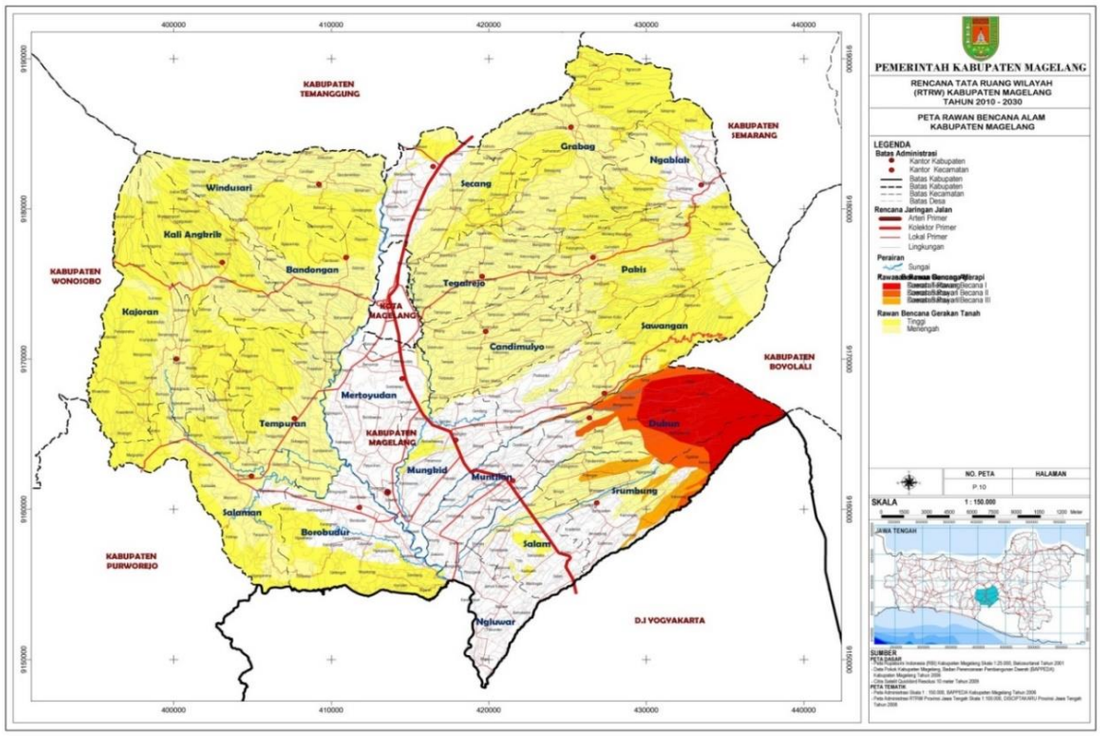
Di samping pusat-pusat kegiatan sebagaimana telah dijelaskan di dalam Perda RTRW Kabupaten Magelang, struktur ruang kabupaten Magelang, juga dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan administratif, yaitu:

a. pusat pelayanan administratif kabupaten/ibukota Kabupaten adalah Kota Mungkid;
b. pusat pelayanan administratif kecamatan meliputi ibukota kecamatan: Salaman, Borobudur, Ngluwar, Salam, Srumbung, Dukun, Muntilan, Mungkid, Sawangan, Candimulyo, Mertoyudan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Tegalrejo, Pakis, Grabag, dan Ngablak;
c. pusat pelayanan administratif kelurahan meliputi ibukota kelurahan: Secang, Sumberejo, Muntilan, Mendut, dan Sawitan; dan
d. Pusat pelayanan administratif desa meliputi 367 Ibukota desa.

1.2.8 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang sangat rawan bencana alam khususnya bencana erupsi gunung berapi dan gerakan tanah. Bencana alam yang terjadi di wilayah kabupaten ini merupakan konsekuensi dari kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah, dan keberadaan Gunung Merapi. Ancaman bencana yang disebabkan oleh faktor alam yang pernah terjadi di Kabupaten Magelang, antara lain:

a. tanah longsor di 21 kecamatan;
b. banjir di aliran sungai terutama di Sungai Progo dan Sungai Elo;
c. angin lesus/puting beliung yang sering terjadi di 21 kecamatan;
d. kekeringan/krisis air bersih di 21 kecamatan (kemarau panjang), sedangkan pada musim kemarau pendek terjadi krisis air bersih di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Borobudur (Desa Kenalan, Desa Candirejo, Desa Kembanglimus, Desa Wringinputih, Desa Bumiharjo dan Desa Giritengah), Kecamatan Kajoran (Desa Wonogiri) serta Kecamatan Salaman (Desa Margoyoso dan Desa Ngargoretno);
e. Kebakaran hutan;
f. Letusan Gunung Merapi, 3 kecamatan berada di KRB III
g. Aliran awan panas, gas racun, lontaran batu pijar, lontaran material, aliran lava, dan aliran lahar Gunung Merapi, terdiri atas 16 desa di 3 kecamatan yang merupakan Kawasan rawan bencana II
h. lahar/banjir dampak sekunder dari letusan Gunung Merapi meliputi: sepanjang aliran sungai Krasak, Bebeng, Sat, Putih, Blongkeng, Pabelan, Trinsing dan Apu yang merupakan Kawasan rawan bencana I
i. Disamping itu, sebagian besar Wilayah Kabupaten Magelang yang memiliki kemiringan lereng >15% dan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana gerakan tanah. Wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah rawan gerakan tanah tingkat tinggi, tingkat menengah sampai dengan tingkat sangat rendah.



Sumber: RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010 - 2030

Gambar 1.3

Peta Rawan Bencana di Kabupaten Magelang

1.3. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam perumusan dan penyusunan Renja DLH Kabupaten Magelang antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja DLH adalah membuat penyesuaian arahan pelaksanaan program dan kegiatan DLH sesuai dengan evaluasi renja yang telah dilaksanakan. Adapun tujuannya adalah tersusunnya pedoman pelaksanaan kerja DLH yang terpadu dan sinergi antara keinginan masyarakat, target RKPD Kabupaten/Kota, Kondisi dan situasi Tahun 2020, Rencana Kerja pengelolaan lingkungan Hidup Provinsi Jawa tengah maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Renja perubahan ini digunakan untuk acuan penyusunan KUA PPAS Perubahan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renja SKPD DLH Kabupaten Magelang Tahun 2020 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang pengertian singkat Perubahan Renja SKPD DLH Kabupaten Magelang Tahun 2020 dan urgensi terhadap penyusunannya yang terdiri dari:
   a. Latar Belakang;
   b. Gambaran Umum Pelayanan SKPD;
   c. Landasan Hukum;
   d. Maksud dan Tujuan; dan
   e. Sistematika Penulisan.
2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020, memuat tentang narasi dan deskripsi hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLH kabupaten Magelang hingga Triwulan II Tahun 2020, dan capaian prioritas dan target program Renstra DLH Kabupaten Magelang sampai dengan Triwulan II tahun 2020, serta isu strategis terkait kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam menyelesaikan urusan lingkungan hidup dan kehutanan di kabupaten Magelang.
3. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, memuat tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dan kebutuhan dana atau pembiayaan dalam Renja DLH Kabupaten Magelang
4. BAB IV PENUTUP, memuat uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut Perubahan Renja DLH Kabupaten Magelang Tahun 2020.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Evaluasi Renja DLH Triwulan II 2022 dan Capaian Renstra DLH.

Indikator kinerja pembangunan didasarkan pada inidikator program sesuai renstra DLH 2019-2024. Terdapat 2 (dua) indikator program penunjang dan 19 (sembilas belas) urusan lingkungan hidup. Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan ***lingkungan hidup*** sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status Capaian Target
				TW I 2022	TW II 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**						
1	Cakupan Fasilitasi Dan Pengawasan Dokumen Lingkungan	100%	100%	55,33%	56,06%	56,06%	Akan Tercapai
II	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						
1	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Sesuai SPM	100%	100%	75%	100%	100%	Tercapai
III	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**						
1	Cakupan Konservasi Jogo Tuk	13,47%	11,39%	10,65%	10,88%	10,88%	Akan Tercapai
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						
1	Persentase RTH Publik yang terkelola	25,85%	25,75%	8,11%	8,11%	8,11%	Perlu upaya keras
V	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						
1	Persentase pengelolaan sampah	54,91%	47,99%	NA%	40,74%	40,74%	Akan Tercapai
VI	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						
1	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sector industri)*	100%	100%	NA%	56%	56%	Akan Tercapai

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2022	Status Capaian Target
				TW I 2022	TW II 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
VII	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						
1	Cakupan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	38,65%	33,71%	17,29%	17,29%	17,29%	Akan Tercapai
VIII	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						
1	Cakupan Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Lingkungan Hidup	25,27%	23,85%	23,9%	25,43%	25,43%	Tercapai
IX	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
1	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	37,53%	62,10%	62,10%	Akan Tercapai
2	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%	53,73%	99,65%	99,65%	Akan Tercapai
X	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						
1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	100%	100%	NA	33%	33%	Akan Tercapai

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Dari 11 indikator urusan lingkungan hidup diketahui bahwa 2 target indikator berstatus telah dan akan tercapai, 8 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu Upaya Keras atau perlu perhatian.
b) Dua 1 indikator yang perlu perhatian tersebut disebabkan belum adanya kepastian data.

2.2. DATA CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRI WULAN II

2.2.1 Indeks Kinerja pengelolaan sampah

Target 2022 : 45 angka (0-100)
Capaian 2022 : NA angka (0-100)

a. Penyebab kegagalan: untuk RPJMD 2019-2024, perhitungan persentase pengelolaan sampah adalah mengacu Perbup Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPS3R, dan belum optimalnya pengelolaan sampah di TPSS.

b. Alternatif solusi: Sedang dilaksanakan upaya penggunaan dana tidak terduga sesuai dengan hasil koordinasi dengan kemenko marives Biro Keuangan Daerahdan BPKP untuk perluasan tanah TPA dan pembelian incinerator, serta diupayakan pembinaan dan diusahakan program magang di TPS3R
c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan adalah sosialisasi dan advokasi pembangunan TPS3R.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga, target penanganan sampah bukan hanya di wilayah perkotaan, namun menjadi seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Berdasarkan data kajian timbulan sampah harian tahun 2016, jumlah sampah sampah yang dihasilkan tiap jiwa adalah 0,5 Kg/Hari. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang per Semester I Tahun 2022 adalah sejumlah 1.310.512 jiwa. Jumlah timbulan sampah harian Tahun 2022 adalah sebesar 667 Ton/Hari. Jumlah pengurangan pada tahun 2022 adalah sebesar 120,77 Ton/Hari atau 18,12%. Jumlah sampah yang tertangani sebesar 150,76 Ton/Hari atau 22,62%. Total pengelolaan sampah Tahun 2022 adalah sebesar 271,53 Ton/Hari atau 40,74%.

2.2.2. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim

Target 2022 : 40,25%
Capaian 2022 : 14,81%

a. Penyebab kegagalan: Data Ruang Terbuka Hijau Publik belum sinkron antara Provinsi dan Pendataan dari DLH. Serta Terdapat kendala pembangunan RTH Taman ARTOS karena belum adanya kejelasan desain dan pengelolaan aset.
b. Penyebab keberhasilan: Masyarakat semakin sadar tentang pentingnya penghijauan terutama untuk menyelamatkan mata air. Sudah dilaksanakan kesepakatan bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dalam pembinaan sekolah adiwiyata, serta makin populernya program kampung iklim.
c. Alternatif solusi yang dilakukan adalah Perlu pendataan ulang dan berkoordinasi dengan DPUPR, BPS, dan Provinsi Jawa tengah mengenai Data Ruang Terbuka Hijau Publik.
d. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan adalah sosialisasi, pelatihan dan gerakan penanaman.

Total Terdapat 42 Mata air yang di konservasi sampai dengan 2022 dari 223 Mata Air target terdaftar pada renstra 2019-2024. Pada Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup mengandalkan Bank pohon untuk konservasi daerah resapan air. Tanaman pada Bank Pohon berasal dari sumbangan ASN yang naik pangkat, jabatan, gaji, pension maupun perjalanan dinas luar daerah. Terdapat juga CSR dari swasta dan akademisi. Dinas Lingkungan Hidup memberikan pelatihan pada komunitas jogo tuk untuk membuat bibit berkualitas dan bernilai ekonomi.

Tabel 3.5 Konservasi Kawasan Resapan Air Tahun 2022

NO	PEMOHON	Jumlah pohon	Luas lahan (m2)	Mata Air yang dikonservasi
	JANUARI			
1	Desa deyangan	30	750	Tuk Bulu
2	Kantor BNN	7	175	Tuk Bulu
3	Desa kemutuk,kec.tempuran	405	10.125	MA sendangboto
4	Desa surodadi,Candimulyo	167	4.175	MA Kanoman, Tuk Putri, Tuk Lanang
5	Lingkungan RPH GRABAG	18	450	Citrosono
	FEBRUARI			
6	SMPN 1Kota Mungkid	35	875	Tuk Bulu
7	SDN1Tegalrejo	9	225	Pisangan
8	Desa Ketunggeng,Kec.Dukun	40	1.000	MA Kali Keji
9	Desa Wonoroto,Kec.windusari	50	1.250	Tuk Ringin Putih
	MARET			
10	desa sutopati,kajoran	14	350	Lincat
11	SDN1 Sikepan,Srumbung	25	625	Tuk Blongkeng Gede
12	Desa Kaponan, Kec.Pakis	250	6.250	Brangkal
13	Desa Krinjing, Kec. Secang	55	1.375	Kalibening
14	Desa Tirto, Kec.Ngluwar	60	1.500	Tuk Kedung
	APRIL			
15	spmn Kota mungkid/Khustini	7	175	Tuk Bulu
16	Kecamatan kajoran	60	1.500	Lincat
17	Kecamatan salaman	50	1.250	Gayam
18	Desa selomirah,kec.Ngablak	72	1.800	Citrosono
19	Desa Jogonegoro, Kec.Mertoyudan	50	1.250	Tuk Gending
20	Sd Jomoyo 2 Salam	19	475	Tuk Tirto
21	BEM Untidar untuk Babadan Dukun	50	1.250	Tuk Gintung
22	Kantor Kecamatan borobudur	28	700	Kali pondok
	MEI			
23	SMPN 1 Tegalrejo	55	1.375	Pisangan
24	SMPN 1 Ngablak	50	1.250	Citrosono
25	SMPIT INSAN KAMIL KAJORAN	50	1.250	Lincat
26	Akmil Demon Mgl	130	3.250	Kanoman
27	Desa Pandanretno,Kajoran	185	4.625	Lincat
	JUNI			
28	Donasi rapat adiwiyata(R.Kalpataru)	121	3.025	
29	SDN Glagahombo,tegalrejo/Saryadi	30	750	Pisangan
30	SDN Ngluwar 2 (sugeng)	15	375	Tuk Gedok
31	BS margo rukun,pringombo,tempuran	60	1.500	Sendangboto
	JULI			
32	SDN KALIGNEGORO 5 /BAYU	13	325	Tuk Gending
33	Desa Bandongan	50	1.250	Sendang Kamulyan
34	SDNPanca Arga1/Supriyati,SPd.SD	25	625	Tuk Gending
35	Desa Tirto, Kec.Salam	127	3.175	Tuk Tirto
36	KKN UIN Yogya/gunungpring/Rizqo	30	750	Buntung
	AGUSTUS			
37	SMPIT INSAN KAMIL KAJORAN	50	1.250	Lincat
38	SDN Mangunrejo,tegalrejo	20	500	Pisangan

NO	PEMOHON	Jumlah pohon	Luas lahan (m2)	Mata Air yang dikonservasi
39	SDN Sokorejo, tegalrejo	20	500	Pisangan
40	Bem Untidar untuk Polengan srumbung	55	1.375	MA Kali Keji
	SEPTEMBER			
41	Desa Sambak	20	500	Lincat
42	Koramil Tempuran	80	2.000	Sendangboto
43	Kec.Mungkid	60	1.500	Kopi mpat
44	Kec.Sawangan	25	625	Semaren
	OKTOBER			
45	Paguyuban Rafting Kab.Magelng	25	625	Tuk Tirto
46	SDN Gulon 1 Salam	20	500	Tuk Tirto
47	SMPN 2 Tegalrejo	48	1.200	Pisangan
48	SDN Rambeanak 1	15	375	Tuk Cebol
49	SDN Bumirejo 2	13	325	Tuk Gending
50	SMAN 1 NGLUWAR	50	1.250	Tuk Gedok
51	DINSOS PPK PPPA/Prasetyo	30	750	Tuk Tirto
52	Desa Polengan/Nur widodo	100	2.500	MA Kali Keji
54	Arum jeramElo/Rosyid setiyawan	45	1.125	Tuk Tirto
55	Desa Kalibening,Dukun/witono	30	750	
56	Krangtaruna,cikal,candirEjo,borobudur	85	2.125	Ngebrak
57	SD Muhanmmadiyah 1 Muntilan	25	625	MA Kali Keji
	NOVEMBER			
58	Desa Jogonegoro, Kec.Mertoyudan	20	500	Tuk Gending
59	Desa Somoketro,salam	50	1.250	Tuk Tirto
60	Desa, kenayan,Borobudur	200	5.000	Ngebrak
61	Desa, giripurno,Borobudur	595	14.875	Ngebrak
62	Desa, ngargogondo,Borobudur	595	14.875	Ngebrak
63	Desa, bigaran,Borobudur	595	14.875	MA Bigaran
64	Desa, kenalan,Borobudur	445	11.125	Ngebrak
65	Desa gantang,sawangan	595	14.875	Semaren
66	Desa tampirkulon,candimulyo	595	14.875	MA Kanoman, Tuk Putri, Tuk Lanang
67	Desa kebonrejo,candimulyo	595	14.875	MA Kanoman, Tuk Putri, Tuk Lanang
68	Desa tegalrejo,tegalrejo	595	14.875	Pisangan
69	Desa bawang,pakis	595	14.875	Pisangan
70	Desa ngablak,ngablak	595	14.875	Citrosono
71	Desa Sumberejo Ngablak	595	14.875	Citrosono
72	Desa kalisasri,tempuran	595	14.875	Sendang Boto
73	Desa sriwedari,salaman	595	14.875	Jetis, Jambe
74	Desa pandanretno,kajoran	595	14.875	Lincat
75	Desa sambak,kajoran	595	14.875	Lincat
76	Desa sukorejo,kajoran	595	14.875	Lincat
77	Desa maduretno,kaliangkrik	595	14.875	Sijajurang
78	Desa Sukosari,bandongan	595	14.875	Sendang Kamulyan
79	Desa ngargosoko,srumbung	595	14.875	Tuk Kali Keji
80	MAN 1Magelang	50	1.250	Tuk Gending
81	Mapala Untidar	170	4.250	
82	DPC LDIIKEC.SALAMAN	220	5.500	Gayam

NO	PEMOHON	Jumlah pohon	Luas lahan (m2)	Mata Air yang dikonservasi
83	Desa banjaragung,Kajoran	110	2.750	Tuk Kaliares
	DESEMBER			
84	SDN Adikarto,Muntilan	28	700	Tuk Kali Keji
85	Tk PGRI Bumirejo,Mungkid	16	400	Tuk Gending
86	SDN Menayu 1, Muntilan	19	475	Tuk Kali Keji
87	UNNES TEMANGGUNG	37	925	Citrosono
	JUMLAH	**15.333**	**383.325**	

Hasil pembinaan terhadap 220 sekolah sampai dengan tahun 2022, terdapat 5 sekolah adiwiyata baru. Total sekolah adiwiyata sampai dengan 2021 sebanyak 48 sekolah. Hasil pembinaan terhadap 21 Desa pada Tahun 2022 sudah teregistrasi 15 Desa Proklim baik kategori baru maupun upgrade tingkat. Total desa Proklim sampai dengan tahun 2022 sebanyak 52 Desa.

Tabel 3.7 Daftar Sekolah Adiwiyata Tahun 2022

NO	Jenis Sekolah (SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA/MAK*)	Status (Negeri/Swasta*)	Nama Sekolah	Tahun
1	2	3	4	5
NASIONAL				
1	SMP	Negeri	SMP N 2 Mertoyudan	2017
2	SD	Negeri	SD N Sidomulyo 1	2018
3	SD	Negeri	SD N Tamanagung 4	2018
4	SMP	Negeri	SMP N 1 Tempuran	2019
5	SD	Negeri	SD N Muntilan 3	2019
6	SD	Swasta	SDIT Alam Al-Hikmah Secang	2019
7	SD	Negeri	SD N Windusari 2	2021
8	SD	Negeri	SD N Progowati	2021
PROVINSI				
1	SD	Negeri	SD N Jumoyo 2	2018
2	SD	Negeri	SD N Ringinanom 1	2018
3	SMP	Swasta	SMP Terpadu Ma'arif Gunungpring	2020
4	SMP	Negeri	SMP N 1 Borobudur	2021
5	SD	Negeri	SD N Borobudur 1	2021
KABUPATEN				
1	SD	Negeri	SD N Sedayu 4	2018
2	SD	Negeri	SD N Madyocondro	2019
3	SD	Negeri	SD N Kalipucang	2019
4	SD	Negeri	SD N Salaman 1	2019
5	SD	Negeri	SD N Ngadirejo	2019
6	SD	Negeri	SD N Blondo 3	2019
7	MI	Negeri	MIN 6 Magelang	2019

NO	Jenis Sekolah (SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA/MAK*)	Status (Negeri/Swasta*)	Nama Sekolah	Tahun
1	2	3	4	5
8	MI	Swasta	MI Muhammadiyah Kaweron	2019
9	SD	Negeri	SD N Gunungpring 1	2020
10	SD	Negeri	SD N Gunungpring 2	2020
11	SD	Negeri	SD N Gunungpring 3	2020
12	SD	Negeri	SD N Gunungpring 4	2020
13	SD	Negeri	SD N Muntilan	2020
14	SD	Negeri	SD N Menayu 1	2020
15	SD	Negeri	SD N Grabag 1	2020
16	SD	Negeri	SD N Tampingan 1	2020
17	SD	Negeri	SD N Girirejo 3	2020
18	SD	Negeri	SD N Salaman 2	2020
19	SD	Negeri	SD N Sengi 2	2020
20	MI	Negeri	MIN 1 Magelang	2020
21	MI	Negeri	MIN 3 Magelang	2020
22	MI	Negeri	MIN 7 Magelang	2020
23	SD	Swasta	SD Terpadu Ma'arif Gunungpring	2020
24	SD	Swasta	SD Muhammadiyah Tamanagung	2020
25	SMP	Negeri	SMP N 1 Mungkid	2020
26	SMP	Negeri	SMP N 1 Tegalrejo	2020
27	SMP	Negeri	SMP N 1 Ngablak	2020
28	SMP	Negeri	SMP N 1 Pakis	2020
29	SMP	Negeri	SMP N 2 Pakis	2020
30	SD	Negeri	SD N TampirKulon 1	2021
31	SD	Negeri	SD N Tegalsari 2	2021
32	SD	Negeri	SD N Surodadi 1	2021
33	MI	Negeri	MIN 2 Magelang	2021
34	MI	Negeri	MIN 4 Magelang	2021
35	SD	Negeri	SD N Kalijoso	2021

Tabel 3.8 Daftar Desa Proklim 2022

no	nama Desa	Ket			
		Pratama	Madya	Utama	Lestari
1	Desa Ngrancah Kecamatan Grabag			v	
2	Desa Ngargomulyo Kecamatan Dukun			v	
3	Dusun Madukoro II Desa Madukoro Kecamatan Kajoran			v	
4	Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur			v	
5	Desa Sambak Kecamatan Kajoran			v	v
6	Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan			v	

no	nama Desa	Ket			
		Pratama	Madya	Utama	Lestari
7	Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran			v	
8	Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan			v	v
9	Desa Banyubiru Kecamatan Dukun			v	
10	Kelurahan Muntilan Kecamatan Muntilan			v	
11	Desa Jumoyo Kecamatan Salam			v	
12	Desa Candirejo Kecamatan Borobudur			v	
13	Polbangtan			v	
14	Dusun Taruman Desa Umbulsari Kecamatan Windusari			v	
15	Dusun Kebonrejo desa Kebonrejo Kecamatan Candimulyo		v	v	
16	Desa Blondo Kecamatan Mungkid		v		
17	Dusun Kersan Desa Jerukagung Kecamatan Srumbung		v	v	
18	Desa Ngargoretno Kecamatan Salaman		v	v	
19	Desa Margoyoso Kecamatan Salaman			v	
20	Desa Paten Kecamatan Srumbung			v	
21	Desa Tirto Kecamatan Grabag		v	v	
22	Dusun Ngapon Desa Ketangi Kecamatan Kaliangkrik		v		
23	Desa Krincing Kecamatan Secang		v		
24	Desa Sawangan Kecamatan Sawangan			v	
25	Desa Krinjing Kecamatan Kajoran		v		
26	Desa Krumpakan Desa Kajoran		v		
27	Desa Pandansari Kecamatan Kajoran		v		
28	Desa Pucungroto Kecamatan Kajoran		v		
29	Desa Bambusari Kecamatan Kajoran		v		
30	Desa Mangunrejo Kecamatan Kajoran		v		
31	Desa Sutopati Kecamatan Kajoran		v		
32	Desa Pandanretno Kecamatan Kajoran		v		
33	Desa Sukomulyo Kecamatan Kajoran		v		
34	Desa Sidorejo Kecamatan Kajoran		v		
35	Desa Gandusari Kecamatan Bandongan		v		
36	Desa Majaksingi Kecamatan Borobudur		v		
37	Desa Ketep Kecamatan Sawangan			v	
38	Desa Butuh Kecamatan Sawangan			v	
39	Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan			v	
40	Desa Ketundan Kecamatan Pakis		v		
41	Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan		v		
42	Desa Soronalan Kecamatan Sawangan		v		
43	Desa Wulunggunung Kecamatan Sawangan			v	
44	Desa Pogalan Kecamatan Pakis		v		
45	Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan		v		
46	Desa Podosoko Kecamatan Sawangan		v		
47	Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan		v		
48	Desa Tirtosari Kecamatan Sawangan		v		
49	Desa gantang Kecamatan Sawangan		v		
50	Desa Kapuhan Kecamatan Sawangan		v		
51	Desa Jati Kecamatan Sawangan		v		
52	Desa Pagersari		v		

2.2.3 Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan,PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Target 2022 : 6,98 %

Capaian 2022 : 4,05 %

a. Penyebab Kegagalan: Persentase pelaporan dokumen lingkungan hidup oleh usaha dan / atau kegiatan masih sangat rendah karena banyak usaha dan / atau kegiatan yang wajib lapor pengelolaan lingkungan nya terkendala pengujian kualitas air dan udara. Saat ini UPTD Laboratorium Lingkungan DLH tidak menerima pengajuan dari luar DLH karena dicabutnya peraturan daerah yang menjadi dasar pungut retribusi pengujian kualitas lingkungan.
b. Alternatif solusi : Sedang diupayakan untuk memasukkan biaya retribusi pengujian kualitas lingkungan pada rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah berkoordinasi dengan Dirjen Pertimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI.

2.3. Prestasi Urusan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Magelang meraih penghargaan sebagai pelopor program inovasi Aplikasi Among Roso & Bank Pohon Sebagai Strategi Keberlanjutan Pelayanan Air Minumdi di ajang malam apresiasi Tribun Inspirasi Award.



Gambar 3.4.1 Trofi AMPL AWARD 2022

Prestasi tingkat nasional yang dicapai oleh DLH adalah Program Kampung Iklim (Proklim) tingkat Nasional. Prestasi luar biasa diraih oleh Kabupaten Magelang karena mendapatkan penghargaan di 15 (lima belas) desa di tahun 2022. Desa-desa dimaksud mendapatkan proklim pertama kali maupun upgrade kategori. Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Melalui pelaksanaan ProKlim, Pemerintah memberikan penghargaan terhadap masyarakat di lokasi tertentu yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Pelaksanaan Proklim mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19/2012 tentang Program Kampung Iklim. ProKlim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah minimal setingkat Dusun/Dukuh/RW dan maksimal setingkat Desa/Kelurahan atau yang dipersamakan dengan itu. Pada tahun 2022 ini, Kementerian Lingkungan Hidup juga memberikan Penghargaan Pembina Proklim kepada Pemerintah Kabupaten Magelang. Penghargaan ini diberikan karena sudah terdapat 52 (lima puluh dua) desa dan kawasan di Kabupaten Magelang yang mendapatkan anugerah proklim nasional. Desa Sambak berhasill mendapatkan anugerah Trophy proklim lestari.

Tabel 2.1
Capaian Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama) sampai dengan Tri Wulan II 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TIPE PERHITUNGAN	TARGET		TRIWULAN I			TRIWULAN II		
			RENSTRA	PK	Realisasi	(%)	Analisis	Realisasi	(%)	Analisis
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	non komulatif	**45**	**45**	**na**	**na**	**Analisis :** Sampai dengan bulan mei belum ada data. Hambatan/permasalahan : - sampah yang terhitung hanya di penimbangan TPA Pasuruhan. - Belum ada kontrol jumlah sampah di tangani di TPSS - Keterbatasan TPA - Jumlah pengurangan sampah belum update **Rencana Tindak Lanjut :** - Percepatan Revitalisasi TPSS - Optimalisasi cakupan layanan. - Perbaikan mekanisme kerja - Memilah sampahnya dan melaksanakan prinsip pengelolaan sampah ramah lingkungan reduce, reuse, dan recycle		**na**	**Analisis :** perhitungan persentase pengelolaan sampah adalah mengacu Perbup Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPS3R, dan belum optimalnya pengelolaan sampah di TPSS. **Rencana Tindak Lanjut :** Sedang dilaksanakan upaya perluasan tanah TPA dan pembelian incinerator dan pembinaan program magang di TPS3R
	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	non komulatif	**40,25**	**40,25**	**na**	**na**	**Analisis :**Sampai dengan bulan mei belum ada dat**a** **Rencana Tindak Lanjut :**- Pendidikan usia dini melalui sekolah adiwiyata		**14,81**	**Analisis :**Data RTH Publik belum sinkron antara Provinsi dan Pendataan dari DLH.**Rencana Tindak Lanjut :**Pendataan ulang dan berkoordinasi dengan DPUPR, BPS, dan Provinsi Jawa tengah mengenai Data Ruang Terbuka Hijau Publik.
	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan, PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	non komulatif	**6,98**	**6,98**	**na**	**na**	**Analisis :** **-** Sampai dengan bulan mei belum ada data Hambatan/permasalahan : - Belum ada hasil penilaian **Rencana Tindak Lanjut :**		**4,05**	**Analisis :** Terkendala karena dicabutnya peraturan daerah pengujian kualitas air dan udara yang menjadi dasar pungut retribusi pengujian kualitas lingkungan. **Rencana tindak lanjut :** Berkoordinasi dengan Dirjen Pertimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kegiatan sampai dengan Tri Wulan II 2022.

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja DPA Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)
1	2	3		4		5		6		7
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**71,30**	**%**	**71,32**	**%**	**71,34**	**Persen**	**na**	**%**	**na**
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	**22**	**%**	**0**	**%**	**45**	**Persen**	**na**	**%**	**na**
	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	**39,59**	**%**	**39,59**	**%**	**6,98**	**Persen**	**4,04**	**%**	57,88%
	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	**12,98**	**%**	**8,94**	**%**	**40,25**	**Persen**	**14,81**	**%**	36,80%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**1**	**Persen**	**100**	**Persen**	**62,1**	Persen	**62,1**
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	**100**	**Persen**	**1,046**	**Persen**	**100**	**Persen**	**99,65**	Persen	**99,65**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	Persen	100	Persen	100	Persen	200	Persen	77,78%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00%

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja DPA Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun	38	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	200,00%
	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	5	Dokumen	0	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00%
	Jumlah dokumen laporan tribulanan yang tersusun	20	Dokumen	0	Dokumen	3	Dokumen	6	Dokumen	200,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersusun	5	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%
	Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun	5	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%
	Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP dan Evaluasi RTP	5	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00%
	Jumlah dokumen SP yang tersusun	2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00%
	Jumlah SOP yang tersusun	2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan OPD	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	46,43%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	6	Bulan	50,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	69	Dokumen	14	Dokumen	14	Dokumen	6	Dokumen	42,86%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan kepegawaian perangkat daerah	100	Persen	0	Persen	100	Persen	0	Persen	124,05%
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya	315	Orang	0	Orang	105	Orang	103	Orang	98,10%
	Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya	128	Orang	0	Orang	8	Orang	12	Orang	150,00%

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja DPA Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum perangkat daerah	100	Persen	12	Persen	100	Persen	100	Persen	27,64%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	60	Kali	5155	Kali	12	Kali	6	Kali	50,00%
	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	780	Orang Hari	0	Orang Hari	156	Orang Hari	10	Orang Hari	6,41%
	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	775	Orang Hari	90	Orang Hari	115	Orang Hari	32	Orang Hari	27,83%
	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	95	Rapat	0	Rapat	19	Rapat	5	Rapat	26,32%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan jasa penunjang perangkat daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	125,76%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	3000	Surat	5155	Surat	6000	Surat	3091	Surat	51,52%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	1056	Unit	11	Unit	14	Unit	28	Unit	200,00%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang penunjang milik daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	121,15%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	61	Unit	11	Unit	14	Unit	22	Unit	157,14%
	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	40	Unit	8	Unit	8	Unit	16	Unit	200,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur/perlengkapan yang dipelihara	4	Paket	144	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat/mesin yang dipelihara	130	Unit	0	Unit	26	Unit	22	Unit	84,62%

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja DPA Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	5	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00%
										87,13%
										Tinggi
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah**	**100**	**Persen**	**0**	**Persen**	**100**	**Persen**	**0**	Persen	0,00%
	Persentase ketersediaan dokumen kajian, perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	**100**	**Persen**	**0**	**Persen**	**100**	**Persen**	**33**	Persen	**33**
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen penyusunan dan pelaporan RPPLH	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	50,00%
Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Penyusunan RPPLH	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00%
Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RPPLH yang tersusun (IKPLHD dan IKLH)	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten	7	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00%

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja DPA Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)
Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS RTRW yang tersusun	4	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00%
										25,00%
										Sangat Rendah
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup**	**38,65**	**Persen**	**62**	**Persen**	**33,71**	**Persen**	**17,29**	Persen	**51**
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau	43	Usaha/ Kegiatan	36	Usaha/ Kegiatan	10	Usaha/ Kegiatan	0	Usaha/ Kegiatan	60,00%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen kualitas air yang dibuat	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00%
	Jumlah dokumen kualitas udara yang dibuat	0	Dokumen	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00%
	Jumlah rekomendasi/ijin/pertek air limbah dan/atau emisi yang dikeluarkan	4	Rekomendasi	13	Rekomendasi	1	Rekomendasi	0	Rekomendasi	0,00%
	Jumlah usaha/kegiatan pencemar yang dibina	40	Usaha/ Kegiatan	1	Usaha/ Kegiatan	5	Usaha/ Kegiatan	4	Usaha/ Kegiatan	80,00%
	Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	140	Usaha/ Kegiatan	0	Usaha/ Kegiatan	25	Usaha/ Kegiatan	25	Usaha/ Kegiatan	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah koordinasi dilaksanakan	8	Kali	0	Kali	1	Kali	0	Kali	0,00%

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja DPA Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)
Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Kimia/	0	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00%
	Jumlah Peralatan Laboratorium yang dipelihara	5	Paket	1	Paket	1	Paket	0	Paket	0,00%
	Pengelolaan Sistem Layanan Laboratorium Lingkungan Terakreditasi	1	Paket	1	Paket	1	Paket	2	Paket	200,00%
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah informasi yang dibuat	1000	LHU	0	LHU	200	LHU	87	LHU	200,00%
Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Bimtek/pelatihan	15	Pelatihan	0	Pelatihan	0	Pelatihan	0	Pelatihan	0,00%
	Jumlah Parameter yang Terakreditasi	11	Parameter	11	Parameter	11	Parameter	22	Parameter	200,00%
	Jumlah Sistem yang dikelola	1	Paket	1	Paket	1	Paket	2	Paket	200,00%
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pemulihan yang terlaksana	3	Paket	0	Paket	1	Paket	0	Paket	133,33%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah sarpras PPA yang diadakan	1	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00%
	Jumlah verifikasi hibah yang dilaksanakan	3	Kelompok	0	Kelompok	3	Kelompok	4	Kelompok	133,33%
										131,11%
										Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Persentase RTH Publik yang terkelola**	**39,6**	**Persen**	**100**	**Persen**	**25,75**	**Persen**	**8,11**	Persen	**31**
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang dikelola	77	Ha	24,44	Ha	77,5	Ha	49,00	Ha	177,57%

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja DPA Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)
Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah bahan konstruksi pengelola RTH	5	Paket	1	Paket	1	Paket	2	Paket	200,00%
	Jumlah bahan kontruksi pengelola RTH yang di beli	5	Paket	1	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00%
	Jumlah bahan (pupuk dan obat) pengelolaan RTH	5	Paket	1	Paket	1	Paket	2	Paket	200,00%
	Jumlah bibit tanaman yang di beli	6	Paket	1	Paket	1	Paket	2	Paket	200,00%
	Jumlah mechanical elektrical yang di beli	5869	Meter	2169	Meter	2169	Meter	4338	Meter	200,00%
	Jumlah pengelola RTH Publik yang di kelola	318	Orang	55	Orang	54	Orang	107	Orang	198,15%
	Pembangunan RTH	20	Paket	1	Paket	1	Paket	0	Paket	0,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah alat yang di beli	5	Paket	6	Paket	1	Paket	2	Paket	200,00%
	Jumlah alat yang di kelola	53	Unit	53	Unit	53	Unit	106	Unit	200,00%
	Jumlah kendaraan yang di beli	1	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00%
	Jumlah kendaraan yang di kelola	9	Unit	9	Unit	12	Unit	24	Unit	200,00%
										177,57%
										Sangat Tinggi
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)***	**72**	**Persen**	**0**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	Persen	**100**
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase usaha sektor industri yang mengelola limbah B3 sesuai peraturan	2197	Persen	330	Persen	71	**Persen**	0	Persen	160,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan	Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	160	Usaha/ Kegiatan	30	Usaha/ Kegiatan	20	Usaha/ Kegiatan	50	Usaha/ Kegiatan	250,00%

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja DPA Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)
melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase pelaporan pengelolaan limbah B3	111	Persen	0	Persen	10	Persen	7	Persen	70,00%
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah limbah B3 medis yang ditangani	8	Ton	0	Ton	5	Ton	2	Ton	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah kerjasama dengan pengelola limbah B3	3	Kerjasama	0	Kerjasama	1	Kerjasama	1	Kerjasama	100,00%
	Pengadaan sarana dan prasarana penanganan limbah B3 medis	4	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00%
										130,00%
										Sangat Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**56,06**	Persen	**56**
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaporan dokumen lingkungan hidup	100	Persen	100	Persen	100	Persen	200	Persen	75,00%
	Persentase pemenuhan dokumen lingkungan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	200	Persen	75,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase Fasilitasi Persetujuan Lingkungan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	200	Persen	200,00%
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup,	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek di bidang Lingkungan Hidup	0	Peserta	0	Peserta	50	Peserta	0	Peserta	0,00%

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja DPA Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)
Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dokumen lingkungan	118	Usaha/Kegiatan	15	Usaha/Kegiatan	16	Usaha/Kegiatan	4	Usaha/Kegiatan	25,00%
										75,00%
										Sedang
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	**Cakupan konservasi jogo tuk**	**13,47**	**Persen**	**2,79**	**Persen**	**11,39**	**Persen**	**10,88**	Persen	**96**
Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen profiling jogo tuk yang dibuat	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Tersedianya Sistem Informasi Sumber Mata Air*	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00%
Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Komunitas Mata Air yang dibentuk	50	Komunitas	18	Komunitas	10	Komunitas	0	Komunitas	84,00%
Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan,	Jumlah komunitas mata air yang dibentuk	50	Komunitas	900	Komunitas	10	Komunitas	24	Komunitas	240,00%

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja DPA Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)
dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah orang yang dilatih	200	Orang	0	Orang	40	Orang	40	Orang	100,00%
	Jumlah orang yang disosialisasi	950	Orang	900	Orang	200	Orang	0	Orang	0,00%
	Jumlah penghargaan kalpataru yang difasilitasi	0	Penghargaan	0	Penghargaan	1	Penghargaan	0	Penghargaan	0,00%
	Jumlah pohon yang ditanam dari bank pohon	5000	Paket		Paket	1000	Paket	800	Paket	80,00%
										42,00%
										Sangat Rendah
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup**	**25,27**	**Persen**	**11,83**	**Persen**	**23,85**	**Persen**	**28,28**	Persen	**119**
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah adiwiyata dan Desa Proklim yang teregistrasi	**15**	Sekolah/ Desa	**14,41**	Sekolah/ Desa	15	Sekolah/ Desa	**10**	Sekolah/ Desa	1282,00%
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Bintek proklim	56	Kali	10	Kali	2	Kali	4	Kali	200,00%
	Jumlah Pembinaan Proklim	60	Orang	485	Orang	5	Orang	80	Orang	1600,00%
	Jumlah Peserta Bintek adiwiyata	6	Orang	0	Orang	2	Orang	75	Orang	3750,00%
	Jumlah Sekolah Adiwiyata yang dibina	136	Sekolah	62	Sekolah	5	Sekolah	33	Sekolah	660,00%
	Peringatan Hari Lingkungan Hidup	0	Kali	0	Kali	0	Kali	0	Kali	0,00%
Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Bimtek konservasi lahan kritis dan daerah rawan bencana	0	Paket	0	Paket	1	Paket	2	Paket	200,00%

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja DPA Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)
	Verifikasi Lokasi Hibah Tanaman	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00%
										1282,00%
										Sangat Tinggi
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM**	**100**	Persen	**100**	Persen	**100**	**Persen**	**100**	Persen	**100**
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	35,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/ditangani	3	Aduan	9	Aduan	15	Aduan	3	Aduan	20,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah surat teguran dan sanksi yang diterbitkan	0	Surat	0	Surat	10	Surat	5	Surat	50,00%
										35,00%
										Sangat Rendah
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase pengelolaan sampah**	**54,91**	**Persen**	**38,17**	Persen	**47,99**	**Persen**	**40,74**	Persen	**85**
Kegiatan Pengelolaan Sampah	Cakupan Desa Pengelola Sampah	0	Persen	45	Persen	19,35	Persen	0	Persen	95,64%
	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	0	Persen	0	Persen	22,58	Persen	0	Persen	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja DPA Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	0	Persen	0	Persen	25,41	Persen	0	Persen	
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Adipura	2	Paket	2	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00%
	Jumlah laporan pengelolaan sampah	5	Dokumen	28	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%
	Penyusunan IKPS	0	Paket	0	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00%
Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Pengelola Pengurangan Sampah yang dikelola	138	Orang	1	Orang	26	Orang	52	Orang	200,00%
	Lomba Bank Sampah	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00%
	Lomba TPS3R	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00%
	sosialisasi / bintek / pelatihan	93	Kali	16	Kali	12	Kali	9	Kali	75,00%
Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Alat yang dipelihara	609	Unit	97	Unit	114	Unit	0	Unit	0,00%
	Jumlah Bahan Pengolah Sampah dan Lindi	4	Paket	1	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00%
	Jumlah Bangunan Konstruksi Pemeliharaan Sarpras	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00%
	Jumlah kendaraan yang dikelola	174	Unit	194	Unit	33	Unit	64	Unit	193,94%
	Jumlah mechanical electrical yang dibeli	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00%
	Jumlah pengelola penanganan sampah yang dikelola	967	Orang	194	Orang	201	Orang	392	Orang	195,02%
	Pengadaan alat penanganan sampah	5	Paket	0	Paket	1	Paket	0	Paket	0,00%
Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Bank Sampah yang dibina	149	Kelompok	0	Kelompok	4	Kelompok	3	Kelompok	75,00%
	Jumlah TPS3R yang dibina	173	Kelompok	0	Kelompok	0	Kelompok	0	Kelompok	0,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di	Jumlah Bank Sampah Induk dibangun	0	Unit	0	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00%
	Jumlah kontener sampah dibeli	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00%

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun lalu (2021)		Target Kinerja DPA Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah PDU dibangun	0	Unit	0	Unit	1	Unit	0	Unit	0,00%
	Jumlah Rumah kompos dibangun	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00%
										95,64%
										Sangat Tinggi

2.4. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DLH

Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magelang agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pada Bulan Maret Tahun 2020, Indonesia mengalami keadaan darurat pandemi COVID 19. Dalam rangka antisipasi dampak kesehatan, lingkungan, sosial dan ekonomi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang melaksanakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi tersebut.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM khususnya dibidang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam bidang lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga di masa yang akan datang sistem data dan informasi lingkungan hidup menjadi salah satu sumber informasi dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial maupun lainnya.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Terkait dengan masukan dari berbagai elemen tentang kegiatan yang diusulkan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang menambahkan usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, maupun dari yang langsung ditujukan kepada dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang berdasarkan hasil pengumpulan informasi serta penelitian dilapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Usulan program dan kegiatan tersebut diperoleh berdasarkan masih banyak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan serta masyarakat dan stakeholder lainnya belum sepenuhnya menyadari bahwa pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan dan pencegahan kerusakan lingkungan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pokok-pokok Kebijakan Lingkungan Hidup Nasional yang terkait dengan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang meliputi arah dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sedangkan pokok-pokok kebijakan pemerintah melalui program 100-0-100 dan milenium development goals yang sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

1. Arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
   a. Perlu peningkatan kualitas informasi tentang konsep dan rujukan Pembangunan yang berkelanjutan.
   b. Perlu diperbaiki sistem birokrasi dan informasi serta kemitraan dilingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, disamping koordinasi antar institusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan tentang pembangunan yang berkelanjutan.
2. Arah kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan
   a. Peningkatan pemahaman tentang konsep berwawasan lingkungan
   b. Perlunya sosialisasi kepada pelaku usaha tambang dan industri tentang pentingnya industri yang berwawasan lingkungan.
3. Penanganan pandemic COVID-19 serta dampak ikutannya.

Adapun kebijakan yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan penaatan dan penataan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Peningkatan pengawasan, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
3. Peningkatan sarana/prasarana dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
4. Peningkatan kerjasama antar lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan limbah dan pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah domestik;
5. Mengoptimalkan Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup;
6. Peningkatan kapasitas sumbedaya manusia dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup;
7. Peningkatan koordinasi dan keterpaduan serta pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan antar lembaga pemerintah pusat maupun daerah dan antar sektor;
8. Meningkatkan kualitas data dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
9. Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
10. Melaksanakan penanganan limbah B3 medis Covid-19.
11. Menyiapkan sarana dan prasarana penanganan limbah B3 medis Covid 19 isolasi mandiri masyarakat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah" (SEDAYA AMANAH) mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi "Sedaya Amanah". Sedaya dalam bahasa jawa mempunyai arti semua (sedoyo) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi jawa adalah wareg, wutuh, waras dan wasis. Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, waras adalah terjaminya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Dinas Lingkungan Hidup mendukung terwujudnya visi Bupati terutama melalui misi Berdaya Saing. Misi – misi Bupati saling terkait dan mendukung dalam mewujudkan Visi Bupati. Pembangunan Kabupaten Magelang harus memiliki keunggulan berbasis karakteristiknya sebagai daerah konservasi. Pemanfaatan sumber daya alam dikelola seoptimal mungkin sebagai titipan anak cucu dan generasi penerus. Semua stakeholder pembangunan berkelanjutan secara bijak dan kreatif mensinergikan penyelamatan lingkungan hidup dan peningkatan manfaat ekonomi.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari

pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD.

Tujuan dan sasaran daerah mewujudkan pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi DLH diuraikan melalui misi kedua. Misi kedua "Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup". Misi ini memiliki tujuan meningkatnya daya saing daerah dengan indikator Capaian Pembangunan Wilayah Berkelanjutan (CPWB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), *gini ratio*, dan PDRB perkapita. Sasaran pada tujuan ini adalah:

a. tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik dengan indikator IKLH;
b. meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dengan indikator indeks pembangunan wilayah;
c. meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan, peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, peningkatan nilai PDRB sektor industri pengolahan, peningkatan nilai PDRB sektor pariwisata, pertumbuhan investasi, indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan indeks desa membangun.

Dalam rangka sinkronisasi renstra dan RPJMD dibuat kesinambungan indikator mulai dari tujuan daerah pada RPJMD hingga kegiatan yang dibuat dalam renstra. DLH fokus pencapaian sasaran daerah "**tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik dengan indikator IKLH**". Oleh karena itu, Renstra mengadopsi sasaran Daerah tersebut menjadi Tujuan Perangkat Daerah dengan indikator yang sama.

Sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran operasional dari tujuan perangkat daerah. Sasaran daerah dibuat berdasarkan permasalahan pokok pelayanan perangkat daerah. Sasaran perangkat daerah mempunyai indikator yang disokong oleh program – program yang dilaksanakan. Penanggungjawab tercapainya target sasaran perangkat daerah adalah Kepala Dinas. Sasaran Dinas lingkungan Hidup periode renstra 2019 - 2024 adalah "**Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan**", Dengan indikator:

1. Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim,
2. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah,
3. Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan, PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Rumusan lengkap dan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah"

Misi	Tujuan	Sasaran Daerah / Tujuan DLH	Sasaran DLH	Indikator	Satuan	Target capaian					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2		3	4	6	10	11	12	13	14	15
Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya daya saing daerah			Capaian Pembangunan Wilayah Berkelanjutan	%	NA	NA	71,91	74,76	82,21	82,21
		Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik		IKLH	angka (0-100)	71,30	71,32	71,34	71,36	71,38	71,38
			Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim*	%	NA	NA	40,25	40,70	41,15	41,15
				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	angka (0-100)	41,47	42	45	50	55	55
				Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	NA	4,65	6,98	9,30	11,63	11,63

Tabel 3. 2.
Rincian Program dan Kegiatan Perubahan 2022

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											**25.375.007.101**	**53.722.383.701**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											**8.631.956.101**	**8.640.974.901**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											**14.000.000**	**14.000.000**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Mertoyudan, Deyangan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	45 angka 1-100	45 angka 1-100	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Mertoyudan, Deyangan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	45 angka 1-100	45 angka 1-100	4.000.000	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun					3 dokumen	3 dokumen						
		Jumlah dokumen laporan tribulanan yang tersusun					3 dokumen	3 dokumen						
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersusun	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Mertoyudan, Deyangan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	45 angka 1-100	45 angka 1-100	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun					1 dokumen	1 dokumen						
		Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP dan Evaluasi RTP					1 dokumen	1 dokumen						
		Jumlah dokumen SP yang tersusun					1 dokumen	1 dokumen						

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
		Jumlah SOP yang tersusun					1 dokumen	1 dokumen						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											**8.109.928.000**	**7.658.145.000**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	45 angka 1-100	45 angka 1-100	8.024.928.000	7.573.145.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rasionalisasi anggaran sesuai kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Mertoyudan, Deyangan	100 %	100 %	14 dokumen	14 dokumen	45 angka 1-100	45 angka 1-100	85.000.000	85.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											**5.000.000**	**5.000.000**		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	105 orang	105 orang	45 angka 1-100	45 angka 1-100	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya					8 orang	8 orang						
Administrasi Umum Perangkat Daerah											**90.196.636**	**145.476.636**		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 kali	12 kali	45 angka 1-100	45 angka 1-100	90.196.636	145.476.636	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana					156 orang hari	156 orang hari						
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana					115 orang hari	115 orang hari						

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan					19 rapat	19 rapat						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											**0**	**166.064.000**		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				23 Unit			0	166.064.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan komputer dan printer
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											**83.200.000**	**87.200.000**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah surat yang dikelola	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6000 surat	6000 surat	45 angka 1-100	45 angka 1-100	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)		100 %	100 %			45 angka 1-100	45 angka 1-100	73.200.000	77.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											**329.631.465**	**329.631.465**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Mertoyudan, Deyangan	100 %	100 %	14 unit	14 unit	45 angka 1-100	45 angka 1-100	200.000.000	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara					8 unit	8 unit						

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah mebeleur/perlengkapan yang dipelihara	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Mertoyudan, Deyangan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	45 angka 1-100	45 angka 1-100	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah alat/mesin yang dipelihara	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	26 unit	26 unit	45 angka 1-100	45 angka 1-100	9.090.000	9.090.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	45 angka 1-100	45 angka 1-100	118.141.465	118.141.465	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP											**225.000.000**	**225.000.000**		
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota											**130.000.000**	**130.000.000**		
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	Penyusunan RPPLH	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	6.98 %	6.98 %	90.000.000	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
			Pemerintah Daerah											
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RPPLH yang tersusun (IKPLHD dan IKLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	6.98 %	6.98 %	40.000.000	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota											**95.000.000**	**95.000.000**		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen kajian, perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	Jumlah Dokumen KLHS RTRW yang tersusun	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah		100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	6.98 %	6.98 %	95.000.000	95.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											**410.000.000**	**922.390.000**		
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											**247.000.000**	**759.390.000**		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah dokumen kualitas air yang dibuat	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.71 %	33.71 %	1 dokumen	1 dokumen	6.98 %		76.000.000	400.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	FS dan DED IPAL KOMUNAL, Biogas dan IPAL Komunal Tahu
		Jumlah dokumen kualitas udara yang dibuat					0 dokumen	0 dokumen						
		Jumlah rekomendasi/ijin/pertek air limbah dan/atau emisi yang dikeluarkan					1 rekomendasi	1 rekomendasi						
		Jumlah usaha/kegiatan pencemar yang dibina					5 usaha/kegiatan	5 usaha/kegiatan						

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
		Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi					25 usaha/kegiatan	25 usaha/ kegiatan						
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah koordinasi dilaksanakan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.71 %	33.71 %	1 kali	1 kali	6.98 %	6.98 %	5.000.000	43.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Percontohan Biogas Agni
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Bahan Kimia/	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin	Kab. Magelang, Mertoyudan, Deyangan	33.71 %	33.71 %	1 paket	1 paket	6.98 %	6.98 %	166.000.000	316.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Belanja Alat Laboratorium Lingkungan untuk Menunj
		Jumlah Peralatan Laboratorium yang dipelihara					1 paket	1 paket						

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
		Pengelolaan Sistem Layanan Laboratorium Lingkungan Terakreditasi	lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah				1 paket	1 paket						ang Pemantauan Kualitas Lingkungan
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											**160.000.000**	**160.000.000**		
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah Bimtek/pelatihan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.71 %	33.71 %	0 pelatihan	0 pelatihan	6.98 %	6.98 %	160.000.000	160.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		Jumlah Parameter yang Terakreditasi					11 parameter	11 parameter						
		Jumlah Sistem yang dikelola					1 paket	1 paket						
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											**3.000.000**	**3.000.000**		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah sarpras PPA yang diadakan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan		33.71 %	33.71 %	0 paket	0 paket	6.98 %	6.98 %	3.000.000	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
		Jumlah verifikasi hibah yang dilaksanakan	terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah				3 kelompok	3 kelompok						
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											**4.347.000.000**	**2.369.168.000**		
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota											**4.347.000.000**	**2.369.168.000**		
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH Publik yang terkelola	Jumlah bahan konstruksi pengelola RTH	Cakupan konservasi sumber daya alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.75 %	25.75 %	1 paket	1 paket	40.25 %	40.25 %	3.825.000.000	1.847.168.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggaran Pembangunan RTH Taman Depan ARTOS di hapus. Perawatan & pengecatan tiang lampu hias/lampu taman
		Jumlah bahan kontruksi pengelola RTH yang di beli					0 paket	0 paket						
		Jumlah bahan (pupuk dan obat) pengelolaan RTH					1 paket	1 paket						
		Jumlah bibit tanaman yang di beli					1 paket	1 paket						
		jumlah mechanical elektrical yang di beli					2169 meter	2169 meter						
		Jumlah pengelola RTH Publik yang di kelola					54 orang	54 orang						
		Pembangunan RTH					1 paket	1 paket						
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH Publik yang terkelola	Jumlah alat yang di beli	Cakupan konservasi sumber daya alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.75 %	25.75 %	1 paket	1 paket	40.25 %	40.25 %	522.000.000	522.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
		Jumlah alat yang di kelola					53 unit	53 unit						
		Jumlah kendaraan yang di beli					0 paket	0 paket						
		Jumlah kendaraan yang di kelola					12 unit	12 unit						
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)											**440.000.000**	**440.000.000**		
Penyimpanan Sementara Limbah B3											**40.000.000**	**40.000.000**		
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*	Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 usaha/kegiatan	20 usaha/ kegiatan	6.98 %	6.98 %	40.000.000	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		Persentase pelaporan pengelolaan limbah B3					10 %	10 %						
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											**400.000.000**	**400.000.000**		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*	Jumlah kerjasama dengan pengelola limbah B3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 kerjasama	1 kerjasama	6.98 %	6.98 %	400.000.000	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		Pengadaan sarana dan prasarana penanganan limbah B3 medis					1 Paket	1 Paket						
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)											**60.000.000**	**60.000.000**		
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											**60.000.000**	**60.000.000**		
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan	Persentase Fasilitasi Persetujuan Lingkungan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	6.98 %	6.98 %	50.000.000	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek di bidang Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 peserta	50 peserta	6.98 %	6.98 %	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dokumen lingkungan					16 usaha/kegiatan	16 usaha/ kegiatan						
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH											**107.000.000**	**137.580.000**		
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH											**40.000.000**	**40.000.000**		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana	
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Cakupan konservasi jogo tuk	Tersedianya Sistem Informasi Sumber Mata Air*	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.39 %	11.39 %	1 dokumen	1 dokumen	40.25 %	40.25 %	40.000.000	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH											**67.000.000**	**97.580.000**		
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Cakupan konservasi jogo tuk	Jumlah komunitas mata air yang dibentuk	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.39 %	11.39 %	10 komunitas	10 komunitas	40.25 %	40.25 %	67.000.000	97.580.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelatihan pemanfaatan pohon aren sebagai pohon konservasi
		Jumlah orang yang dilatih					40 orang	40 orang						
		Jumlah orang yang disosialisasi					200 orang	200 orang						
		Jumlah penghargaan kalpataru yang difasilitasi					1 penghargaan	1 penghargaan						
		Jumlah pohon yang ditanam dari bank pohon					1000 Paket	1000 Paket						
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											**81.000.000**	**107.545.000**		
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											**81.000.000**	**107.545.000**		
		Bintek proklim			23.85 %	23.85 %	2 kali	2 kali	40.25 %	40.25 %	77.000.000	91.850.000		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemas yarakatan	Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	Jumlah Pembinaan Proklim	Cakupan Konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan Iklim	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5 orang	5 orang					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tambahan pelatihan untuk proklim
		Jumlah Peserta Bintek adiwiyata					2 orang	2 orang						
		Jumlah Sekolah Adiwiyata yang dibina					5 Sekolah	5 Sekolah						
		Peringatan Hari Lingkungan Hidup					0 kali	0 kali						
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	Jumlah Bimtek konservasi lahan kritis dan daerah rawan bencana	Cakupan Konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan Iklim		23.85 %	23.85 %	1 paket	1 paket	40.25 %	40.25 %	4.000.000	15.695.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tambahan pelatihan Adiwiyata
		Verifikasi Lokasi Hibah Tanaman					0 paket	0 paket						
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP											**24.000.000**	**24.000.000**		
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota											**24.000.000**	**24.000.000**		
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM	Jumlah aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/ditangani	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 aduan	15 aduan	6.98 %	6.98 %	12.000.000	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM	Jumlah surat teguran dan sanksi yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 surat	10 surat	6.98 %	6.98 %	12.000.000	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											**11.049.051.000**	**38.953.665.600**		
Pengelolaan Sampah											**11.049.051.000**	**38.953.665.600**		
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan sampah	Fasilitasi Adipura	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.99 %	47.99 %	1 paket	1 paket	45 angka 1-100	45 angka 1-100	30.000.000	109.191.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		Jumlah laporan pengelolaan sampah					1 dokumen	1 dokumen						
		Penyusunan IKPS					1 Paket	1 Paket						
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase pengelolaan sampah	Jumlah Pengelola Pengurangan Sampah yang dikelola	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.99 %	47.99 %	26 orang	26 orang	45 angka 1-100	45 angka 1-100	422.000.000	876.157.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sosialisasi PKK, Uji kompos TPS3R, Pelatihan magang TPS3R
		Lomba Bank Sampah					1 paket	1 paket						
		Lomba TPS3R					1 paket	1 paket						
		sosialisasi / bintek / pelatihan					12 kali	12 kali						

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
														di Malang
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan sampah	Jumlah Alat yang dipelihara	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.99 %	47.99 %	114 unit	114 unit	45 angka 1-100	45 angka 1-100	6.300.000.000	7.948.264.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggaran THL menggenapkan 2 bulan, Suku cadang alat berat, Pakaian Dinas lapangan, instalasi listrik dan sumur bor kemandoran Tegalrejo, BPJS THL penggenapan 2 bulan, Alat bengkel, Printer dan stavolt jembatan timbang TPA, Hanggar baru dan pagar rumah kompos
		Jumlah Bahan Pengolah Sampah dan Lindi					0 paket	0 paket						
		Jumlah Bangunan Konstruksi Pemeliharaan Sarpras					0 paket	0 paket						
		Jumlah kendaraan yang dikelola					33 unit	33 unit						
		Jumlah mechanical electrical yang dibeli					0 paket	0 paket						
		Jumlah pengelola penanganan sampah yang dikelola					201 orang	201 orang						
		Pengadaan alat penanganan sampah					1 Paket	1 Paket						

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									Catatan Penting
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	Jumlah Bank Sampah yang dibina	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.99 %	47.99 %	4 kelompok	4 kelompok	45 angka 1-100	45 angka 1-100	3.050.000	3.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Deyangan, Penangkal petir TPA, BBM Incinerator
		Jumlah TPS3R yang dibina					0 kelompok	0 kelompok						
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	Lahan TPST yang dibeli	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Borobudur, Semua Kelurahan	47.99 %	47.99 %	0 paket	0 paket	45 angka 1-100	45 angka 1-100	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Persentase pengelolaan sampah	Jumlah Bank Sampah Induk dibangun	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.99 %	47.99 %	1 unit	1 unit	45 angka 1-100	45 angka 1-100	4.294.001.000	30.017.002.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penggunaan dana tidak terduga untuk perluasan lahan TPA dan pembelian incinerator.
		Jumlah kontener sampah dibeli					0 unit	6 unit					Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	
		Jumlah PDU dibangun					1 unit	1 unit						
		Jumlah Rumah kompos dibangun					1 unit	1 unit						
TOTAL											**25.375.007.101**	**51.644.865.701**		

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah peraturan bupati tentang pergeseran anggaran ke-5. Terdapat perubahan anggaran pada 6 Program, 9 Kegiatan, dan 15 Sub Kegiatan dengan total perubahan bertambah Rp 26.269.858.600,- dari Rp 25375.007.101,- menjadi Rp 51.644.865.701,- . Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berkurang karena Rasionalisasi anggaran sesuai kebutuhan. Anggaran Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya bertambah untuk Pengadaan komputer dan printer. Anggaran Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut bertambah untuk FS dan DED IPAL KOMUNAL, Biogas dan IPAL Komunal Tahu. Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim bertambah untuk Percontohan Biogas Agni. Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota bertambah untuk Belanja Alat Laboratorium Lingkungan untuk Menunjang Pemantauan Kualitas Lingkungan. Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berkurang karena Anggaran Pembangunan RTH Taman Depan ARTOS di hapus. Anggaran Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH bertambah untuk Pelatihan pemanfaatan pohon aren sebagai pohon konservasi. Anggaran Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan bertambah untuk Tambahan pelatihan untuk proklim. Anggaran Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup bertambah untuk Tambahan pelatihan Adiwiyata. Anggaran Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali bertambah untuk Sosialisasi PKK, Uji kompos TPS3R, Pelatihan magang TPS3R di Malang. Anggaran Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota bertambah untuk Anggaran THL menggenapkan 2 bulan, Suku cadang alat berat, Pakaian Dinas lapangan, instalasi listrik dan sumur bor kemandoran Tegalrejo, BPJS THL penggenapan 2 bulan, Alat bengkel, Printer dan stavolt jembatan timbang TPA, Hanggar baru dan pagar rumah kompos Deyangan, Penangkal petir TPA, BBM Incinerator. Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota bertambah untuk Penggunaan dana tidak terduga untuk perluasan lahan TPA dan pembelian incinerator.Dinas Lingkungan Hidup mengelola anggaran dari dana tidak terduga untuk penyediaan sarana dan prasarana sampah. Mekanisme penggunaan dana tersebut dalam rangka mengatasi keadaan mendesak akibat TPA Pasuruhan dan Klegen sudah melebihi kapasitas daya tampungnya.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang tahun 2022 ini disusun sebagai pedoman dalam Penyusunan Plafon Anggaran Sementara. Perubahan rencana kerja juga sebagai acuan dalam perubahan perjanjian kinerja. Rencana Kerja ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan untuk setiap periode terbatas. Perubahan Rencana Kerja mengacu pada RPJMD dan Renstra 2019 – 2024.

Rencana Kerja ini telah memuat seluruh aspek yang diharapkan untuk dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang. Oleh sebab itu pelaksanaan perubahan rencana kerja membutuhkan kecermatan, kreatifitas dan respon terhadap masalah-masalah Lingkungan Hidup. Dengan demikian dokumen perencanaan ini memiliki sifat yang dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi pemerintah daerah.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang tahun 2022 ini menjadi acuan kerjasama bagi unit-unit pelaksanaan di Dinas Lingkugan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu diharapkan unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja dan target.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup diharap membawa kemajuan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang, sehingga tercipta Kabupaten Magelang yang makin Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah sesuai dengan visi Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, 24 Agustus 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG

SARIFUDIN, SH
Pembina
NIP. 19670212 199312 1 001

SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/185/KEP/24/2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022;
2. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022;
3. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Tahun 2022;
4. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022;
5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022;
6. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2022;
7. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022;
8. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022;
9. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2022;
10. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2022;
11. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022;
12. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022;
13. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022;
14. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022;
15. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022;
16. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022;
17. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022;
18. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022;

19. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022;
20. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2022;
21. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022;
22. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2022;
23. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022;
24. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022;
25. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2022;
26. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022;
27. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Salaman Tahun 2022;
28. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Borobudur Tahun 2022;
29. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngluwar Tahun 2022;
30. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Salam Tahun 2022;
31. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Srumbung Tahun 2022;
32. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dukun Tahun 2022;
33. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sawangan Tahun 2022;
34. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muntilan Tahun 2022;
35. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mungkid Tahun 2022;
36. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mertoyudan Tahun 2022;
37. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tempuran Tahun 2022;
38. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kajoran Tahun 2022;
39. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2022;
40. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bandongan Tahun 2022;
41. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Candimulyo Tahun 2022;
42. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakis Tahun 2022;
43. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngablak Tahun 2022;
44. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Grabag Tahun 2022;
45. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo Tahun 2022;
46. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Secang Tahun 2022;
47. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Windusari Tahun 2022; dan
48. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah dalam periode 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 Agustus 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003